

## Kepemimpinan Polri yang Visioner

Oleh H. Moch Suwondo \*)

Panjangnya masa - transisi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai akibat tidak kunjung usainya usainya krisis multi dimensional yang melanda bangsa dan negara kita, telah melahirkan fenomena **konflik antar elit politik** ( di samping konflik etnis/ agama/komunial, kerusuhan massal, terror bom dan bentuk-bentuk kriminalitas interitas tinggi lainnya), yang berkepanjangan pula.

Untuk saling memenangkan konflik, terkesan telah terjadi pelanggaran etika - moral politik, yang pada gilirannya telah tersublimasi sampai pada taraf *the higher immorality*, yang ditandai oleh terjadinya manipulasi opini publik, korupsi politik dan suasana de stabilitas keamanan. Keadaan ini begitu dapat dirasakan ketika DPR menjatuhkan memorandum I,II dan akhirnya usulan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR terhadap Presiden Wahid.

Sejak lepas dari TNI (ABRI ketika itu), Polri telah menjadi institusi yang mandiri langsung di bawah kelembagaan Presiden. Dalam logika ketatanegaraan dan politik, Polri yang keperanannya selaku aparat penegak hukum, pengayom, pembimbing dan pelindung masyarakat, jelas dihadapkan pada tuntutan untuk mampu mengatasi persoalan bangsanya, yang akar permasalahannya berkisar pada dampak konflik antar elit, yang kemudian melahirkan gesekan komunial kearah ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pada ketika mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Polri tetap memperhatikan perlunya dikedepankan upaya perlindungan

HAM dan prosedur kepolisian yang memang berlaku universal. Bersamaan dengan itu, tuntutan kepastian hukum dan ketertiban pun harus mampu diwujudkan oleh Polri, sehingga dapatlah difahami, jika untuk kepentingan itu tindakan *Police Discretion* acapkali jadi opsi untuk mewujudkan stabilitas keamanan.

Dari beberapa kasus yang ditangani Polri, terutama terhadap kerusuhan massal/ menyerang aparat keamanan (Polri), tewasnya seorang warga

masyarakat Pasuruan-Jawa Timur dalam kerusuhan di Pasuruan - yang kemudian amat dibela oleh Presiden Wahid kepada Pimpinan Polri, Kaplori Jenderal Polisi S. Bimantoro.

Pada awal Juni 2001, dengan alasan karena tuntutan LSM - LSM (yang tidak jelas LSM mana) Jenderal Polisi S.Bimantoro di non-aktifkan oleh Presiden Wahid, melalui Keppres No.40 tahun 2001. Pada Keppres berikutnya, yang waktu terbitnya bersamaan, Irjen Pol. Drs. Chaerudin Ismail (Jabatan Kasespim Polri ) setelah dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, diangkat sebagai Wakapolri yang melaksanakan tugas-tugas Kapolri sehari-hari, Disini Presiden Wahid telah melanggar Keppres No. 54 Tahun 2001 tentang Validasi Organisasi Polri, yang praktis meniadakan jabatan Wakapolri.

Sebelum Keppres di atas terbit, Presiden Wahid meminta agar Jenderal S.Bimantoro mengundurkan diri dari jabatan Kapolri. Di samping sepanjang sejarah tidak lazim ditemukan cara-cara seperti itu, penolakan Jendral Pol. S. Bimantoro memang cukup beralasan (Vide Tap MPR No. VII/MPR/

\*) Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Kepolisan - PPTIK, Jakarta



2000). Dari sinilah, muncul pembiasaan dan polarisasi sikap para Perwira (Tinggi dan Menengah), yang secara dikotomis terbelah ke dalam faksi Bimantoro dan faksi Chaerudin. Selain itu, juga tak sedikit yang abstain, tanpa bersedia terjebak pada keberfihakan (Oportunis?). Maka kontraversial kepemimpinan Polri pun berlangsung, bersamaan dengan adanya intervensi Presiden terhadap institusi Polri.

Sebagai sesuatu "profesionalitas", Polri dengan mendasarkan etika moralitas, komitmen kepada institusi, sesungguhnya memiliki system dan mekanisme internal dalam merekrut calon-calon pemimpin Polri (Wakjakti). Sementara itu, dalam mekanisme itu (pengisian jabatan-jabatan dalam validasi organisasi Polri). Irjen Pol Drs. Chaerudin Ismail bukanlah salah satu perwira tinggi Polri yang memperoleh promosi-jabatan setingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, pengangkatannya sebagai calon pengganti Jendral S. Bimantoro, jelas tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang tersedia di samping mencengangkan kalangan institusi.

Semestinya ia sadar, bahwa pengangkatannya sebagai Wakapolri pasti akan menimbulkan masalah, setidaknya dalam tataran etika dan estetika dalam berorganisasi. Barangkali karena kuatnya dorongan (*driven*) hati nuraninya, yang dilatarbelakangi oleh persepsi yang bersangkutan terhadap kepemimpinan Polri saat ini, maka menjadikan ia tidak peduli terhadap mekanisme internal. Yang ada dalam dirinya adalah tekad untuk memperbaiki Polri melalui konsep Polisi sipilnya tidaklah ia sadar, bahwa kondisi riil politik yang ada, menunjukkan betapa posisi Presiden Wahid mulai goyah?

Sehingga ketika kekuasaan Presiden Wahid kehilangan basis dukungan mayoritas Parlemen, semestinya Presiden tidak lagi membuat keputusan-keputusan strategis, termasuk penggantian mendadak Kapolri.

Adalah sulit dihindarkan adanya insinuai terhadap Presiden, bahwa penggantian Kapolri dimaksudkan untuk "mempertahankan kekuasaan Presiden Wahid". Sadarkah, bahwa upaya itu berarti Polri akan dijadikan alat kekuasaan Presiden Wahid? Lebih-lebih secara apriori, Presiden Wahid senantiasa mengeluarkan ancaman "Dekrit Presiden", terutama ketika ia tak lagi berdaya menghadapi tuntutan DPR. Percepatan Sidang Istimewa MPR dari tanggal 1 Agustus 2001 (sebagaimana telah direncanakan), sesungguhnya dilatarbelakangi sikap nekad Presiden Wahid saat memberhentikan Jendral Pol. S. Bimantoro sebagai Kapolri, dan kemudian mengangkat Jendral Pol. Chaerudin Ismail (setelah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi) sebagai pemangku sementara Kapolri. Padahal Parlemen sebelumnya telah memperingatkannya. Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang berisikan dekrit, merupakan bumerang bagi Presiden Wahid dalam kejatuhannya.

Menghadapi situasi dan kondisi Polri yang delematis, Jendral Pol. S. Bimantoro dengan didukung oleh sebagian besar Perwira Tinggi lainnya, mengambil sikap menunggu dan memonitor dinamika politik detik perdetik. Pilihan sikap dan komitmen terhadap konstitusi, institusi dan rakyatlah mendorong pimpinan Polri di bawah Jendral Pol. S. Bimantoro, untuk memosisikan diri berseberangan secara diametral dengan Presiden Wahid, yang ketika itu sudah nampak gejala-gejala kejatuhannya. Mereka telah mengembangkan nilai-nilai persepsi, sensitibilitas dan estetika dalam menyikapi perkembangan politik kenegaraan kedepan.

Tekad meyusutkan pelaksanaan SI-MPR dan ternyata sukses, tanpa korban, serta berlangsung secara aman dan tertib, sungguh merupakan prestasi tersendiri.

Dalam prespektif kepemimpinan, maka dari *state of mind* dan *state of the spirit* (sikap alam pikiran dan alam kejiwaan), sang pemimpin



ini memiliki "Extra sensory perception", yaitu ketajaman intelektual untuk mengamati situasi, sehingga mampu secara cerdas mengantisipasi apa yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Dan ini dilandasi oleh keteguhan jiwa dan semangat keluhuran moral, etika dan akhlak.

Ini pertanda, kepemimpinan Polri tetap solid dalam memanager tindakan pengamanan dengan baik, rakyat simpati, empati dan mendukung apuaya pengamanan itu. Lahirnya kepemimpinan nasional yang baru, duet Mega - Hamzah Haz, sebagai lambang kerja sama antara nasionalis - Islam diharapkan menjadi pencerahan (*einlightement*) lahirnya konsolidasi demokrasi.

Justru di sinilah, masyarakat akan menuntut Polri untuk lebih menampilkan kinerja secara mandiri dan professional. Upaya rekonsiliasi internal Polri dewasa ini (Pasca SI - MPR) adalah langkah tepat, di

samping tetap memberikan langkah-langkah tindakan pembinaan terhadap beberapa Pamen Polri yang secara prosedural mengesankan ketidak-kompakan Korps dan institusi.

Ketetapan menatap ke depan, melalui perhitungan-perhitungan yang proporsional dan kemampuan melihat lemahnya musuh-musuh demokrasi, yang dilakukan oleh pimpinan Polri itu, sesungguhnya merupakan makna dari sebuah kepemimpinan yang visioner.

Bahwa kepemimpinan itu sendiri sebagai proses (latihan), akan menjadikan seseorang menjadi mahir "*Ubung Macht dem meister*". Kepemimpinan Polri semacam ini, kelak menjadi lebih bermakna (bagi institusi), bila melalui mekanisme internalnya mampu melahirkan calon-calon Kapolri yang handal, sehingga kita justru sulit memilihnya.

Semoga !



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Soekarno - Hatta Semarang Telp. (024) 3562713, 3572083, 3572085  
Jl. Atmodiriono 11 Semarang 50241 Telp. (024) 8411562 Fax. (024) 8336865

*Mengucapkan*

*Selamat Atas Pelantikan*

*Inspektur Jendral Polisi Drs. Nurjaizi, M.M*

*sebagai*

*Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*

*19 Juli 2001*